

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Potensi kawasan karst mencakup sekitar 154.000 km<sup>2</sup> di Indonesia, atau sekitar 0,08% dari total luas daratan. Kawasan karst tersebar di sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan. Namun kawasan karst di Kabupaten Maros dan Pangkep lah yang paling terkenal. Kawasan karst terbesar dan terindah kedua di dunia setelah kawasan karst di China adalah Kawasan Karst Maros-Pangkep (KKMP). Kawasan karst Maros Pangkep berbeda dengan kawasan karst lainnya di Indonesia karena memiliki lingkungan alam yang istimewa dan khas yang dikenal dengan sebutan menara karst. Perbukitan kapur yang tinggi dengan tebing-tebing berbahaya dapat ditemukan di sana..(Ahmad, Hamzah 2016)

Situs geopark merupakan sebuah konsep komprehensif untuk kesejahteraan masyarakat lokal, sehingga setidaknya ada tiga kegiatan penting yang harus dilakukan dalam geopark, yaitu konservasi, edukasi, dan geowisata. Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan kekayaan alam, termasuk kekayaan geodiversity, yang sebagian besar merupakan geoheritage, yang penting bagi aset pendidikan dan pariwisata. Untuk melindungi warisan geologi sekaligus memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat lokal dari keberadaan warisan geologi, konsep pengembangan melalui pengembangan taman bumi atau geopark kini menjadi pilihan yang menarik, termasuk di Indonesia. (Kevin, 2013).

Dalam rangka mempersiapkan Geopark Maros Pangkep yang sebagaimana akan diusulkan menjadi UNESCO Global Geopark, BKKPN Kupang bersama stakeholders terkait mengikuti rapat koordinasi sosialisasi pelaksanaan survey lapangan dan matriks penyusunan dossier secara daring. Sebelumnya sudah diterapkan 15 geopark nasional, namun hanya dua yang disetujui yakni Geopark Maros Pangkep dan Geopark Ijen. Gubernur Sulsel melalui tim TGUPP mendukung penuh rencana pengajuan Geopark Maros Pangkep menjadi Global Geopark UNESCO pada tahun 2021 melalui revisi RPJMD dengan memuat poin-poin kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Isu yang akan diangkat dan diajukan ke UNESCO adalah Geopark Pulau Indonesia yang mengidentifikasi 30 *geosite* prioritas. Delineasi kawasan Geopark Nasional Maros Pangkep meliputi 2 wilayah (Maros dan Pangkep), dengan luas daratan 2.243 kilometer persegi dan luas

laut 2.815 kilometer persegi. Meliputi 7 jalur geologi dan 30 geologi.(Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang, 2020)

Dalam studi kasus diusulkannya Geopark Maros Pangkep menjadi UNESCO Global Geopark (UGG) maka penulis menggunakan kerangka teori multi-track diplomasi. Yakni lebih berfokus kepada track one (negara) dan track two NGO (non government organization). Pada saat awal pembuatan syarat-syarat untuk memenuhi formulir dari UNESCO Global Geopark Gubernur Sulawesi Selatan menerbitkan SK dibuatnya Badan Pengelola Geopark Nasional Maros Pangkep, Lembaga ini terdiri dari para stakeholder, yakni Universitas Hasanuddin, Balai Pelestarian Cagar Budaya, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Pengelola Taman Nasional Bantimurung – Bulusaraung dan Komunitas Pecinta Alam dan Gua. Mereka berkoordinasi dengan pemerintah pusat yaitu Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO atau KNIU melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara resmi mengajukan surat permohonan agar Geopark Maros Pangkep masuk dalam UNESCO Global Geopark. Maka dari itu tulisan ini akan membahas peran serta langkah-langkah dari pihak-pihak terkait dalam menjadikan Geopark Maros Pangkep menuju UNESCO Global Geopark.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tesis ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui upaya serta langkah-langkah para aktor pemerintah beserta stakeholder dalam upaya mengusulkan Geopark Maros Pangkep menjadi UNESCO Global Geopark
2. Penelitian ini juga berupaya menjelaskan dan mendeskripsikan upaya diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan terhadap UNESCO dalam proses pengajuan Geopark Maros menjadi salah satu Global Geopark UNESCO.

## **C. Kontribusi Penelitian**

Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Memberikan informasi terkait perkembangan dalam isu-isu hubungan internasional terutama dibidang kemaritiman. Serta dapat dikembangkan untuk penelitian kedepannya.

## **2. Manfaat Praktis**

Memberikan informasi mengenai upaya dan langkah perlindungan dan pemeliharaan pariwisata berkelanjutan berbasis alam di Maros-Pangkep. Mulailah dengan situs geologi, biologi dan budaya.

## **D. Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah untuk menjawab penelitian ini adalah :

Bagaimana Upaya Diplomasi Indonesia mendapatkan pengakuan Geopark Maros Pangkep sebagai UNESCO Global Geopark?

## **E. Studi Pustaka**

Dalam kajian studi pustaka ini penulis akan mengkorelisikan beberapa penelitian terkait dengan tema yang berkenaan dengan UNESCO Global Geopark yang sudah pernah ada pada penelitian terdahulu. Artikel yang pertama, adalah milik (Elok Faiqoh Fajrin & Khoirunnisa, 2022) yang berjudul Judul: *Indonesia's Diplomacy towards UNESCO in Efforts to Inaugurate the Ciletuh-Palabuhanratu Area as a UNESCO Global Geopark* Penelitian ini menyatakan bahwa Ada tiga pilar utama dari konsep UGG, yaitu warisan geologis, keanekaragaman hayati, dan warisan budaya. Geopark Ciletuh-Palabuhanratu merupakan satu dari sekian banyak Geopark Nasional Indonesia yang diusulkan ke UNESCO untuk nantinya dapat menjadi UGG. Urgensi usulan tersebut antara lain, sarana pendidikan, pengembangan dan pelestarian kawasan, optimalisasi pemanfaatan, dan pemberdayaan masyarakat untuk menaikkan taraf hidup yang lebih baik. Peresmian UNESCO Global Geopark Ciletuh- Palabuhharatu merupakan proses tercepat di Indonesia, karena hanya membutuhkan waktu tiga tahun dari peresmian Nasional ke Global. Keberhasilan ini merupakan upaya dari beberapa pemangku kepentingan yaitu melalui jalur Pemerintah, Bisnis, Warga Negara, Pendidikan dan Media

Artikel yang kedua adalah ditulis oleh (Dheona Fhenta Amelia, 2016) yang berjudul Upaya Pemerintah Indonesia Menjadikan Kawasan Gunung Sewu Sebagai UNESCO Global Geopark Network (GGN) Tahun 2013-2015. Artikel ini menunjukkan proses kawasan Gunung Sewu menjadi UNESCO Global Geopark menemui sejumlah penolakan. Pada tahun 2013, Gunung Sewu mengirimkan dokumen ke GGN UNESCO. Pada konferensi GGN di Korea, UNESCO GGN masih berusaha mempertimbangkan Gunung Sewu sebagai salah satu jaringan geopark global. Pada tahun 2014, permohonan Gunung Sewu untuk menjadi jaringan geopark global kembali

ditolak. Pada pertengahan Maret 2015, Indonesia kembali mengajukan situs Gunung Sewu ke UNESCO. Indonesia berupaya menyelesaikan dan memperbaiki beberapa hal sesuai permintaan UNESCO. Meski mengalami banyak penolakan, namun pihak Indonesia terus berupaya agar pada September 2015 kawasan Gunung Sewu resmi menjadi salah satu jaringan geopark global.

Pada artikel yang ketiga yakni dari (Rahmasari & Parameswari, 2020) Strategi Pemerintah Indonesia untuk Meraih Pengakuan UNESCO sebagai UNESCO Global Geopark Studi Kasus: Kawasan Gunung Rinjani 2013-2018. Kajian ini menunjukkan serangkaian strategi yang diterapkan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan dengan menetapkan peraturan hukum untuk memperkuat kebijakan dalam proses pembangunan dan pengembangan geopark, pengembangan destinasi wisata dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, menyiapkan sumber daya manusia, memperkuat kemitraan dan melaksanakan promosi. Promosi dapat dilakukan dengan memberikan presentasi di berbagai konferensi dan pertemuan internasional, memperkuat tempat dengan membuat tanda atau branding, serta melakukan periklanan di jejaring sosial atau elektronik. Selanjutnya dibentuklah suatu badan pengelola, yaitu Dewan Operasi Harian Rinjani, yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan sehari-hari Geopark Rinjani-Lombok. Selain itu, pemerintah juga memperkuat jaringan dengan geopark lain dan menjalin kerja sama dengan universitas-universitas di Lombok untuk mendukung pengelolaan dan konservasi situs geologi, flora dan fauna Taman Nasional Geologi Rinjani. Melalui strategi tersebut, pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan berhasil menetapkan Geopark Rinjani-Lombok sebagai UNESCO Global Geopark pada tahun 2018.

Artikel yang keempat adalah milik (Ichsan dan Zhiddiq, 2020) yang berjudul Kesiapan Geopark Nasional Maros Pangkep Menuju UNESCO Global Geopark (Studi Pembeding UNESCO Global Geopark Gunung Sewu), Penelitian ini menunjukkan bahwa proses yang dilakukan untuk mengembangkan Geopark Maros Pangkep telah memenuhi beberapa poin, antara lain geohéritage , unik, langka dan indah, pengelolaan Geopark berupaya menarik partisipasi masyarakat lokal, peningkatan ekonomi, dan konservasi. Ada pula sejumlah permasalahan penting, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat mengenai geopark. Geopark Nasional Maros Pangkep dinilai memenuhi kriteria tersebut. Selain itu, Geopark Nasional Maros Pangkep juga telah siap menerapkan pengelolaan berkelanjutan dan saat ini sedang menyusun masterplan yang nantinya akan acuan pengembangan Geopark Nasional Maros Pangkep. Masterplan tersebut

akan memadukan obyek pariwisata, konservasi, alam dan budaya, serta pendidikan dan penelitian berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Artikel yang kelima adalah milik (Hutabarat & Pratiwi, 2022) dengan judul: *Pengembangan Pariwisata Natuna Menuju UNESCO Global Geopark*, Artikel ini mengulas Geopark Natuna, kawasan wisata utama dengan warisan geologi, biologi, dan budaya yang beragam, dengan keunikan geologi, khususnya: batuan lempeng samudera bersifat basal, batuan lempeng benua berupa granit, batuan sedimen, dan batuan metasedimen. Memang batuan tersebut hanya ada dan terdapat di kawasan Kepulauan Natuna. UNESCO Global Geopark bukan hanya tentang geologi. Geopark Global UNESCO menunjukkan keberadaan warisan geologi yang memiliki kepentingan internasional di Kepulauan Natuna dan Indonesia. Tujuan ditetapkannya UNESCO Global Geopark untuk Geopark Nasional Natuna adalah untuk mengeksplorasi, mengembangkan dan menjalin hubungan antara geoheritage dan seluruh aspek warisan alam, budaya, dan nonbendawi lainnya. Warisan geologi, keanekaragaman hayati, dan warisan budaya merupakan tiga pilar utama konsep UNESCO Global Geopark. Geopark Nasional Natuna merupakan salah satu geopark nasional Indonesia yang diusulkan oleh UNESCO untuk menjadi salah satu UNESCO Global Geopark pada tahun 2022. Usulan ini bertujuan untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan, pengembangan dan konservasi kawasan, fasilitas pendidikan dan pemberdayaan masyarakat lokal untuk lebih meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka.

Artikel yang keenam milik (Rahadyan Arka Shunu dan Anna Yuliana, 2021) yang berjudul: *Keuntungan Nasional Indonesia Menjadikan Kawasan Kars Gunung Sewu Sebagai Global Geopark Network (GGN)*. Menurut penulis, harapan atau kepentingan nasional pemerintah Indonesia dalam upaya menjadikan Kars Gunung Sewu sebagai anggota Global Geoparks Network (GGN), khususnya untuk meningkatkan perekonomian atau pendapatan negara dan daerah dengan cara meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Tujuan kedua adalah menjaga dan melestarikan ekosistem karst Gunung Sewu itu sendiri agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Penulis merangkum tujuan atau kepentingan nasional tersebut menjadi dua, yaitu manfaat ekonomi dan manfaat pelestarian lingkungan.

Artikel yang ketujuh ditulis oleh (Neto de Carvalho & Rodrigues, 2020) yang berjudul: *Naturtejo UNESCO Global Geopark: The Culture of Landscape*, Penelitian ini menyatakan Geopark Naturejo Identitas lokal terikat kuat dengan lanskap geologis, hubungan yang sedang digunakan untuk mempromosikan wilayah baru dan tujuan wisata alam yang berbeda di dalam

negeri dan pasar luar negeri, dan untuk mendorong proyek lokal yang berkelanjutan perkembangan. Pendekatan *Naturtejo Global Geopark* adalah untuk mempromosikan jaringan dalam wilayah di baik sektor publik maupun swasta dan dengan lembaga terkait geologi dan geopark dalam pengkhususan seperti perlindungan warisan dan penggunaan, berbasis pendidikan formal dan nonformal juga ekonomi berkelanjutan pada sumber daya lokal.

## **F. Kerangka Teori**

Dalam Penelitian ini penulis akan menggunakan Teori *Multitrack Diplomasi*, *track one* dan *track two*, dan Konsep Kepentingan Nasional.

### **1. Multitrack Diplomacy**

Teori *Multi Track Diplomacy* berasal dari perdebatan lama tentang diplomasi apakah itu dilakukan oleh pemerintah saja atau oleh masyarakat ke masyarakat (*citizen diplomacy*). Ini berasal dari gagasan bahwa perang dapat dihindari jika masyarakat hidup dalam hubungan persahabatan dan pemahaman yang baik. Selain itu, jika pihak-pihak yang terlibat dalam konflik potensial dan konflik nyata berusaha untuk saling memahami posisi yang diambil oleh pihak lawan, perdamaian dapat dicapai. Teknik tawar-menawar dan negosiasi yang biasanya dianggap sebagai bagian dari hubungan diplomatik antar pemerintah dapat diubah dan diterapkan untuk mengontrol keterlibatan warga negara dari berbagai sistem politik (Putri, 2012).

*Multitrack Diplomacy (MTD)* adalah konsep yang mengacu pada upaya untuk mencapai perdamaian. Munculnya aktor-aktor dalam MTD ini adalah lanjutan dari track pertama, negara. Seperti yang disebutkan sebelumnya, banyak sarjana baru dalam ilmu hubungan internasional percaya bahwa aktor dalam hubungan internasional hanyalah presiden, duta besar, menteri, dan perwakilan negara lainnya. Namun, aktor dalam Hubungan Internasional sangatlah beragam (Mujiono & Alexandra, 2019a).

Diplomasi multi-jalur adalah penggabungan semua jalur dan digunakan ketika penggunaan hanya satu jalur tidak dapat mengatasi masalah tertentu. Konsep asli dan murni dari diplomasi multi-jalur menempatkan diplomasi 'jalur satu' di atas daftar sementara menempatkan seluruh jalur tidak resmi di bawah jalur satu. Tetapi Dr. Diamond dan Duta Besar McDonald mengatur ulang diagram tersebut dan menempatkan semua jalur dengan cara yang saling berhubungan. Tidak ada trek yang lebih unggul dari yang lain dan tidak hanya satu trek yang dapat bekerja sendiri, tetapi semua juga saling bergantung satu sama lain. Semua pendekatan memiliki nilai dan sumber daya yang terpisah, tetapi ketika dikoordinasikan mereka dapat bekerja lebih kuat. Harus diakui bahwa

konflik utama dan mengakar antara negara-negara tidak dapat diselesaikan hanya melalui negosiasi resmi, tetapi sekarang ada kebutuhan mendesak untuk memanfaatkan semua jalur (Syed and Khan, 2020).

Konsep multitrack diplomasi merupakan penyempurnaan dari diplomasi jalur kedua. Diplomasi jalur kedua, untuk pertama kali diluncurkan oleh Joseph Montville pada tahun 1982. Konsep ini digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang tidak formal dan cara tidak resmi dalam diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah dan aktor non pemerintah, bahkan individu. Milik mereka kegiatan diplomasi memiliki tiga tujuan utama. Mereka melepaskan atau menolak konflik antar kelompok atau negara bangsa dengan fokus pada komunikasi, bersama pemahaman dan hubungan; mengurangi ketegangan, marah, takut atau salah paham dengan memanusiasi musuh dan saling memberikan pengalaman pribadi langsung di masyarakat; dan mempengaruhi cara pemikiran dan tindakan diplomasi jalur pertama oleh menunjukkan akar masalah, perasaan dan kebutuhan eksplorasi opsi tanpa prasangka, terutama untuk membangun kegiatan diplomatik resmi seperti negosiasi atau mengembangkan kembali kebijakan. Gagasan utama kedua jalur diplomasi adalah bahwa dalam penyelesaian konflik, pemerintah atau negara tidak bisa berjalan sendiri, tetapi itu adalah membutuhkan aktor lain yang memiliki pengetahuan, kemampuan dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan konflik (Dian Effendi, 2013).

***a. Track One (State Actor )***

Pada kenyataannya, pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam proses pemerintahan. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan sosial di setiap negara. Pemerintahan yang berdaulat mengatur urusan dalam negeri dan internasional. Dengan kata lain, menjaga kepentingan nasional negara (Mujiono & Alexandra, 2019a).

Peran aktor dalam hal ini negara, akan mengejar apapun yang dapat membentuk dan mempertahankan, pengendalian suatu negara atas negara lain. Pengendalian tersebut berhubungan dengan kekuasaan yang tercipta melalui teknik-teknik paksaan ataupun kerjasama ( Shunu dan Yuliana, 2021).

*“In their negotiations with one or more other actors, players utilize strategy to obtain favorable results. States use their power resources as leverage to sway one another's behavior. In order to reach an agreement during negotiations, both parties must consider each other's interests as well as their own..”*(Joshua Goldstein, 1999)

Untuk memperjuangkan kepentingannya, maka setiap negara akan memaksimalkan segala potensi yang ada dengan pengembangan kekuatan nasionalnya untuk mendapatkan dan mencapai kepentingan nasionalnya (Rendi Prayuda, 2019).

**b. *Track Two (Non State Actor)***

Josep Montiville (dalam Mujiono & Alexandra, 2019b) Pada tahun 19821, Institut Pelayanan Luar Negeri membuat istilah "track two" untuk menggambarkan metode diplomasi selain aktor formal negara pada track one. Track two adalah nama organisasi non-pemerintah yang melakukan fungsi penting, yaitu membangun hubungan antara pihak yang dilakukan oleh kalangan profesional yang bekerja untuk mencapai tujuan tertentu. Para pihak ini termasuk profesional, individu, atau kelompok yang juga dikenal sebagai warga diplomat atau aktor non-negara.

Diplomasi multi-jalur dalam hakikatnya untuk menjawab lebih langsung tantangan diplomatik yang dihadapi oleh dunia mengubah perbedaan kekuatan dan aktor yang muncul. Diantaranya aktor-aktor baru yang dilibatkan oleh diplomasi multi-jalur adalah demics, organisasi masyarakat sipil, media dan anggota parlemen. Terkait dengan partisipasi akademisi dalam diplomasi (Benedek, 2011). Ditegaskan juga oleh (Mujiono & Alexandra, 2019b) Kelompok di *track two* termasuk pemuka agama, psikolog, profesional, dan orang yang terlibat dalam gerakan sosial. Selain itu, ada komunitas yang mendukung pendidikan. Track two membahas berbagai disiplin ilmu, termasuk politik, sosial, pemerintahan, hubungan internasional, hukum, sosiologi, psikologi sosial, studi perdamaian, dan ilmu humaniora.

Diplomasi Jalur Dua telah melengkapi Diplomasi Tradisional atau Diplomasi Jalur Satu dan dianggap sebagai *off the record* dan kontak informal antara anggota kelompok atau negara saingan dengan tujuan untuk merumuskan rencana, untuk mempengaruhi opini publik dan secara sistematis mengatur sumber daya manusia dan material dengan cara yang akan berguna dalam menyelesaikan perselisihan mereka. Ditekankan oleh Montville bahwa Diplomasi Jalur Dua bukanlah pengganti Diplomasi Jalur Satu; namun, itu mengganti batasan yang telah dipaksakan oleh harapan psikologis orang-orang pada para pemimpin. Jalur Dua Diplomasi bertujuan untuk menawarkan jembatan atau melengkapi pembicaraan resmi Jalur Satu ( Syed and Khan, 2020). *citizen-diplomat* dianggap sebagai perpanjangan tangan diplomatik, alat yang digunakan untuk melayani tujuan diplomatik.(Chataway, 1998)

Sebagaimana disebutkan (Chataway, 1998) *track two* memperluas jangkauan peserta dialog. Upaya yang memungkinkan untuk konsultasi "dengan pihak-pihak yang perlu diwakili,



tetapi tidak terlibat secara resmi. Ini membantu mensosialisasikan mereka untuk kemungkinan partisipasi di masa mendatang. Mengkooptasi pihak-pihak yang mungkin dapat merusak. Menyediakan cara untuk mendapatkan informasi dari pihak-pihak terkait. "*track two*" memungkinkan percakapan "dengan individu yang terkait langsung, atau sumber pengaduan, daripada otoritas atau struktur formal", dan memungkinkan diplomat untuk "memberikan informasi ke tempat-tempat di mana kami tidak memiliki perwakilan resmi.

## **2. Konsep Kepentingan Nasional**

Menurut Alenia 4 Pembukaan UUD 1945, tujuan nasional Indonesia adalah melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan kehidupan bangsa, dan berkontribusi pada ketertiban global yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain itu, Indonesia memiliki kepentingan nasional terhadap Kementerian Luar Negeri dalam hal hubungan antar bangsa (Nanggala et al., 2018). Kepentingan nasional tersebut meliputi: a. Menjaga politik luar negeri dan meningkatkan kerjasama multilateral; b. Meningkatkan peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, memajukan dan melindungi negara.

Dalam, "*Sapta Dharma Caraka*", visi Departemen Luar Negeri Indonesia, menggambarkan kepentingan nasional Indonesia, sebagai berikut:

1. Menjaga dan meningkatkan dukungan internasional terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan Indonesia dan membantu pencapaian kesejahteraan Indonesia melalui kerjasama pembangunan ekonomi dan dagang, investasi, dan transfer teknologi.
2. Meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam proses integrasi ASEAN, memainkan peran aktif di Asia-Pasifik, membangun kemitraan strategis baru Asia-Afrika, dan berhubungan dengan negara berkembang lainnya.
3. Meningkatkan hubungan dan kerja sama bilateral, regional, dan internasional di segala bidang, dan meningkatkan upaya dan kontribusi Indonesia untuk mencapai keamanan dan perdamaian internasional serta memperkuat multilateralisme.
4. Meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional sebagai negara demokratis dan pluralistik yang menghormati hak asasi manusia dan mengedepankan perdamaian dunia.
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri dan mengerahkan diplomasi kemanusiaan untuk mendukung tanggap darurat dan rekonstruksi Aceh dan Nias pasca bencana tsunami dan gempa bumi.

6. Melanjutkan perbaikan diri untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, budaya kerja dan profesionalisme diplomat serta peran utama dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan hubungan luar negeri. Untuk Kepentingan Rakyat adalah pemenuhan kebutuhan dan hajat hidup masyarakat guna membawa kemakmuran bagi masyarakat luas, bangsa, dan negara. Pernyataan visi di atas menggambarkan komitmen yang akan diperjuangkan dan diwujudkan oleh Kementerian Luar Negeri, terutama melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya (core competency) sebagai institusi penyelenggara hubungan dan pelaksana politik luarnegeri dengan tekad kinerja Kementerian Luar Negeri “Diplomasi untuk Rakyat, Diplomasi Membumi”, yang berarti kinerja diplomasi yang dilaksanakan Kementerian Luar Negeri harus dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat (Kemlu, 2019b).

Nilai manfaat ekonomi, keuangan dan pembangunan yang optimal melalui hubungan luar negeri :

1. Nilai manfaat ekonomi adalah jumlah nominal manfaat ekonomi, keuangan dan pembangunan yang dihasilkan oleh hubungan kerjasama, perdagangan, investasi dan pariwisata antar negara.
2. Optimal adalah yang terbaik; Tertinggi; dan paling bermanfaat.
3. Hubungan luar negeri adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan aspek bilateral regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah atau oleh organisasi dan lembaga negara, badan usaha, organisasi, LSM atau warga negara Indonesia.

Sasaran tersebut diukur melalui indikator-indikator yang melekat pada target pada tahun 2019 berdasarkan jumlah negara yang diakui mencapai tujuan peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia, nilai investasi asing di Indonesia, dan jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia (Kemlu, 2019a).

## **G. Hipotesis**

Upaya Diplomasi Pemerintah beserta stakeholder bekerjasama mendapatkan pengakuan Geopark Maros Pangkep sebagai UNESCO Global Geopark telah mendapatkan hasil. Berkat kerjasama semua pihak pada tanggal 20 November 2017, Kawasan Karst Maros Pangkep telah

ditetapkan sebagai Geopark Nasional. Status tersebut diberikan Komite Nasional Geopark Indonesia pada Seminar Nasional Geopark Belitung melalui penyerahan sertifikat.

Pada tahun 2020 dari 12 kandidat pengusulan geopark global menjadi 2 yakni Ijen yang terletak di Jawa Timur dan Maros Pangkep yang ada di Sulawesi Selatan. Setelah pengusulan tersebut pihak UNESCO melakukan *self assessment* (penilaian). Tidak lama setelah penilaian Geopark Maros resmi berstatuskan UNESCO Global Geopark. Keputusan itu dibuat selama pertemuan rapat dewan council UNESCO Global Geopark yang diadakan di Thailand. Pada hari Senin, 5 September 2022. Disusul dengan pengumuman resmi pada 24 Mei 2023 berdasarkan keputusan yang diambil pada Sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke-216 di kota Paris.

## **H. Jangkauan Penelitian**

Penentuan ruang lingkup penelitian pada saat melakukan penelitian merupakan hal yang penting untuk menghindari meluasnya topik pembahasan. Penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada periode 2015-2023 karena ia mengusulkan agar Geopark Maros menjadi Geopark Nasional hingga disetujui secara resmi sebagai UNESCO Global Geopark pada tahun 2023 untuk menciptakan kondisi yang mendukung proses penelitian.

## **I. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah menggunakan penelitian kualitatif deduktif dengan menyambungkan konsep kerangka teori dari teori multitrack diplomasi yang lebih berfokus kepada *track one* (state) dan *track two* (non state actor), yang dihubungkan dengan studi kasus peneliti dan menguji kinerja dari konsep teori dari multitrack diplomasi sehingga muncul hipotesa yang dapat diuji.

#### **a) Subyek Penelitian**

Subyek di dalam penelitian tesis ini ialah langkah dari aktor pemerintah beserta para stakeholder berkontribusi dalam rangka mengupayakan Geopark Maros Pangkep menjadi UNESCO Global Geopark.

#### **b) Lokasi Penelitian**

Tempat untuk melaksanakan penelitian ini ada di Indonesia lebih tepatnya di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan.

### c) Sumber Data

Sumber di dalam tesis ini diperoleh dari dua sumber yakni sumber data sekunder. Sumber sekunder dimana yang diambil dari studi literatur menganalisa jurnal, karya ilmiah, artikel, website dan buku yang berkaitan dengan langkah serta peran dalam rangka mematenkan Geopark Maros menjadi UNESCO Global Geopark dan menganalisis wawancara di kanal youtube Maros TV edisi 9 juni 2021 yang memaparkan tentang perjalanan Geopark Maros dari Geopark Nasional menjadi UNESCO Global Geopark.

### 2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data penulis bersumber daripada buku, *website*, jurnal scopus, berita *update*, dan dari penelitian terdahulu yang akan dirangkum dan disimpulkan sehingga memudahkan dalam mengetahui dan memahami bagaimana langkah dalam rangka upaya menjadikan Geopark Maros Pangkep menjadi UNESCO Global Geopark.

### J. Metode Analisis Data

Teknik analisa dalam penelitian ini menggunakan analisis deduktif. Diawali dengan membuat rumusan masalah yang ada dari umum hingga khusus dikombinasikan dengan konsep dan teori yang relevan. Setelahnya, mengumpulkan berbagai sumber data serta fakta yang sebagaimana dipergunakan dalam menganalisis keterkaitan antara teori dengan sumber data yang telah ditemukan, dan disimpulkan atas rumusan masalah yang diajukan. Fokus penelitian ini terdiri dari :

1. Bagaimana langkah-langkah pihak terkait dalam rangka menjadikan Geopark Maros Pangkep menjadi UNESCO Global Geopark.
2. Mengumpulkan data terkait hal-hal yang melatarbelakangi Maros Pangkep menjadi salah satu yang diajukan menjadi UNESCO Global Geopark
3. Menganalisa bagaimana diplomasi Indonesia berperan dalam studi kasus penetapan Geopark Maros Pangkep menjadi UNESCO Global Geopark

## **K. Sistematika Penulisan**

Sistematika di dalam tesis ini akan dijelaskan dalam 5 bab, yaitu:

### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab pendahuluan ini akan merumuskan poin poin seperti Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kontribusi Penelitian, Studi Pustaka, Kerangka Teori, Hipotesa, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan. Poin poin atau sub bahasan tersebut merupakan kerangka atau *tools* bagi peneliti untuk dapat menjalankan penelitiannya dengan seksama.

### **BAB II Dinamika Sejarah Geopark Maros Pangkep**

Di dalam bab ini menjelaskan tentang sejarah Geopark Maros Pangkep salah satu Karst wisata terdapat berbagai *geosite*, *biological site*, dan *cultural site* juga kondisi aktual dari kawasan geopark.

### **BAB III Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Pengusulan**

Di dalam bab ini menjelaskan tentang Faktor-faktor yang melatarbelakangi Geopark Maros Pangkep diusulkan menjadi UNESCO Global Geopark

### **BAB IV Langkah Dan Perencanaan Yang Dilakukan Para Aktor**

di dalam bab ini membahas Diplomasi yang dilaksanakan Pemerintah beserta stakeholder terkait dalam meresmikan Geopark Maros Pangkep Sebagai UNESCO Global Geopark.

### **BAB V Kesimpulan**

Merupakan bab yang berisi kesimpulan dari seluruh kajian pada bab-bab sebelumnya.